

**PANDANGAN *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PELAKSANAAN
STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR
(Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) dalam Ilmu Syari' ah

Oleh :

**SELFIE MERLIANI
NPM : 1421020221**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar' iyyah*)



**FAKULTAS SYARI' AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**PANDANGAN *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PELAKSANAAN
STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR
(Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) dalam Ilmu Syari' ah



Pembimbing I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I.
Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

FAKULTAS SYARI' AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M

ABSTRAK

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Retribusi merupakan pendapatan Negara dan merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota, yang sangat memperhatikan sekali kebijakan dan pelaksanaan Pengelolaan Perparkiran guna terus meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menertibkan parkir liar dan bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menertibkan parkir liar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menertibkan parkir liar dan untuk menganalisis pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menertibkan parkir liar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), serta sifat penelitian ini berupa *deskriptif analitis*. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengolahan data yaitu, *editing*, *coding* dan sistematika data. Kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Pelaksanaan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menertibkan parkir liar yaitu setiap kegiatan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari dinas, Dinas perhubungan juga berwenang melakukan evaluasi setiap dua tahun terhadap penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir, apabila fasilitas parkir mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas maka pihak dinas perhubungan berhak meniadakan fasilitas tersebut. Dalam melakukan peniadaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir harus dilakukan secara bertahap yang di bantu dari pihak Kepolisian dan Satpol PP. Pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan parkir liar yaitu tidak bertentangan, dikarenakan dalam *siyasah dusturiyah* mengenai tujuan dari pembentukan hukum atau kebijakan pemerintah mempunyai tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, memberikan manfaat kepada mereka dan menolak kemudharatan dengan menjamin kebutuhan pokok dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka yang dalam hal ini parkir liar dapat mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas maka dari itu pemerintah perlu melakukan tindakan demi menertibkan adanya parkir liar..

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SELFIE MERLIANI
NPM : 1421020221
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PANDANGAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”**

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 04 Desember 2020

SELFIE MERLIANI
Npm. 1421020221



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PANDANGAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP
PELAKSANAAN STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENERTIBKAN
PARKIR LIAR (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar
Lampung)**

Nama : SELFIE MERLIANI

NPM : 1421020221

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Susiadi AS, M.Sos.I
NIP. 197501292000031001

Pembimbing II

Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
NIP. 197512302003121002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah**

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

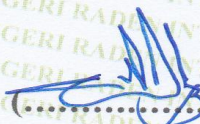
Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PENGESAHAN

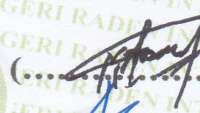
Skripsi: **PANDANGAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR** (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung) disusun oleh **SELFY MERLIANI**, NPM: **1421020221**, Jurusan: **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Rabu, 23 Desember 2020**.

TIM DEWAN PENGUJI


Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.


(.....)


Sekretaris : Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.Sy.


(.....)

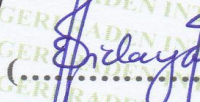
Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.


(.....)

Penguji II : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I


(.....)

Penguji III : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.


(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



H. Saifuddin, M.H.
NPM: 14210221993031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah

Maha Mendengar lagi Maha Melihat

(Q.S. an-Nisa [4]: 58).



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah swt yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Umar Saleh dan Ibu Eva Meinoni tercinta yang telah ikhlas dan sabar membesarkan, mendidik dan selalu mendoakanku.
2. Kepada adik kandungku Okfa Mahayza dan Ridho Riannata yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
3. Teman-teman angkatan 14 Siyasah Syar'iyah kelas C yang selalu memberi semangat, dukungan dan bantuan kepadaku dan Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Selfi Merliani, dilahirkan di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 13 Mei 1996, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Umar Saleh dan Ibu Eva Meinoni.

Pendidikan penulis di mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah 1 Kotabumi lulus pada tahun 2002, melanjutkan ke SDN 4 Tanjung Aman Kotabumi lulus pada tahun 2008, melanjutkan ke MTs Negeri 1 Kotabumi lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke SMA Kemala Bhayangkari Kotabumi lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Siyasah Syar'iyyah (Hukum Tatanegara) sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

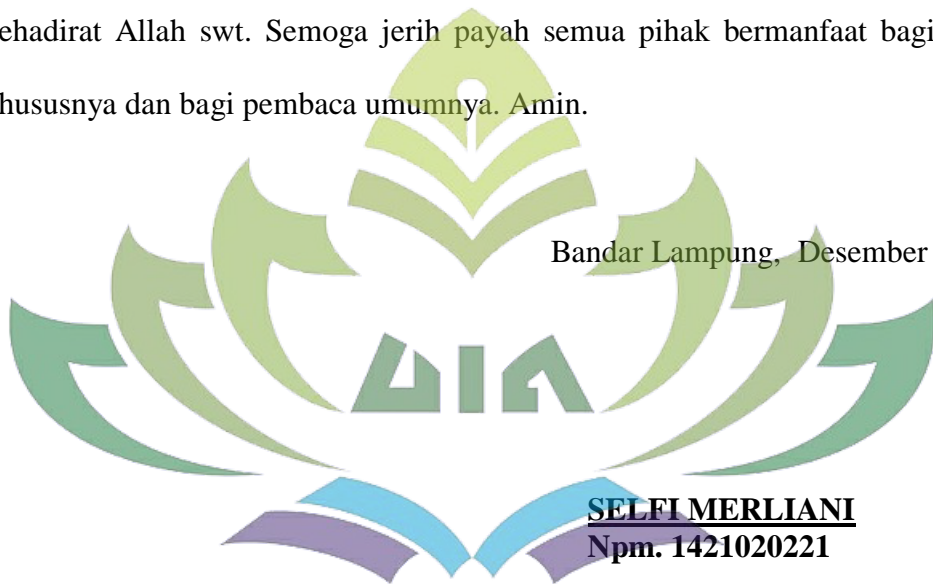
Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Program Studi Siyasah.
4. Bapak Dr. Susiadi AS, M.Sos.I. selaku pembimbing I, dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.

6. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Angkatan 2014
8. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, Desember 2020



SELF MERLIANI
Npm. 1421020221

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikansi Penelitian	8
H. Metode Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	14
1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	14
a. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	14
b. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	17
2. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	21
3. <i>Siyasah Tanfiziyyah</i>	33
4. Parkir Menurut Peraturan Perundang-undangan	39
B. Tinjauan Pustaka.....	55
BAB III LAPORAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Tentang Kota Bandar Lampung	59
1. Sejarah Singkat	59
2. Visi Misi	62
3. Lambang	63
B. Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar	68

BAB IV ANALISI DATA

A. Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Menertibkan Parkir Liar	74
B. Pandangan <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Rekomendasi.....	85

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pemahaman yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca, maka perlu adanya sesuatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah: **“Pandangan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”**. Untuk menghindari kesalahan pemahaman judul di atas, maka perlu ditegaskan beberapa istilah penting, yang terdapat pada judul tersebut antara lain :

1. Pandangan

Pandangan adalah hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat dan sebagainya.¹

2. *Siyasah dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara.²

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 290.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), h. 4.

4. Strategi

Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.⁴

5. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekda.⁵

6. Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus Ibu Kota dan Kota terbesar di Provinsi Lampung.⁶

7. Parkir Liar

Parkir liar adalah parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak.⁷

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menertibkan parkir liar yang mengganggu ketertiban lalu lintas.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 312.

⁴ *Ibid.* h. 438.

⁵ Rahardjo Adisasmita, *Analisis Kebutuhan Transportasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 6.

⁶ Pemerintah Kota Bandar Lampung, (On-line), tersedia di: www.bandarlampungkota.go.id. (10 April 2019).

⁷ Suwardjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Bandung: Penerbit ITB, 2002), h. 73.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul “*Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar*” adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Peran pemerintah dalam melakukan penertiban parkir liar di kota Bandar Lampung bisa dikatakan belum maksimal, hal ini dapat dilihat masih ada parkir liar di pinggir jalan seperti depan Mall Chandra dan Mall Kartini. Parkir liar banyak merugikan masyarakat seperti memakai trotoar untuk parkir sedangkan kegunaan trotoar seharusnya untuk pejalan kaki.

2. Alasan Subjektif

- a. Banyak buku-buku referensi yang membahas tentang Peraturan daerah dan *Fiqh siyasah*.
- b. Judul proposal ini sesuai dengan disiplin ilmu yang pelajari yaitu di Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Perparkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Fenomena tersebut terjadi hampir di seluruh kota yang ada di Indonesia. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik. Gedung dengan aktivitas yang tinggi biasanya merupakan pusat perdagangan dari suatu daerah yang letaknya di pusat kota.

Munculnya aktivitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di kawasan perdagangan.⁸

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan hidup membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif salah satunya dalam pemilikan kendaraan pribadi. Menurut data Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung pada tahun 2018, tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor rata-rata di Kota Bandar Lampung mencapai sekitar 25% setiap tahunnya. Bertambahnya jumlah kendaraan berimplikasi pada jumlah lahan parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pada beberapa kasus, pihak lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan keuntungan. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah kota.⁹

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung, di jelaskan bahwasannya objek retribusi Pelayanan dan Penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum, dimana jalan umum sebagaimana dimaksud di tetapkan oleh Walikota (Pasal 21 berbunyi : Fasilitas parkir terdiri atas, Fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan dan Fasilitas Parkir di ruang milik jalan). Dari hal tersebut jelaslah, bahwasannya Pemerintah dalam hal ini Walikota sebagai Kepala Pemerintah mempunyai kebijakan dan kewenangan dalam menentukan

⁸ *Ibid.* h. 71.

⁹ *Ibid*

titik-titik dan lokasi jalan umum yang dijadikan sebagai objek retribusi parkir.¹⁰

Selain untuk mendapatkan dan menggali potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor tersebut, juga untuk mewujudkan kenyamanan warga Kota Bandar Lampung dan ketertiban arus kendaraan yang parkir di tepi jalan umum untuk tempat parkir kendaraan. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum ini tidak terlepas dari permasalahan transportasi, khususnya menyangkut permasalahan kemacetan di jalan raya yang diakibatkan oleh pemakaian ruas jalan untuk parkir kendaraan. Kebijakan ini tampaknya belum dapat memberikan solusi permasalahan yang ada, disamping, mencari sumber Pendapatan Asli Daerah.¹¹

Mengenai parkir yang merupakan aset negara yang diserahkan pengelolanya kepada perseorangan, para ulama' madzhab hanafiyah berpendapat bahwasannya pengelolaan tersebut hasilnya harus dimasukkan ke *baitul mal*, karena merupakan aset negara yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemashlahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran sholat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin sholat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, *fashahah* maupun ketakwaannya,

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung.

¹¹ *Ibid*

dari yang lainnya. Dalam sholat tersebut, imam berdiri memimpin sholat hanya berjarak beberapa langkah di depan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam keliru dalam sholat, maka makmum dapat melakukan “koreksi” terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak sholat itu sendiri.¹²

Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A’la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah :

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.¹³

Abdul Kadir Audah menyebutkan dua hak, yaitu Hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, beraqidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki.¹⁴

Abdul Karim Zaidan menyebutkan dua hak politik dan hak-hak umum. Hak umum ini mirip dengan apa yang disebut Abdul Qadir Audah.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa masalah hak ini adalah masalah *ijtihadiah*. Hanya yang penting, hak itu berimbalan kewajiban. Oleh karena itu, apabila kita sebut kewajiban *imam* tidak lepas dari maqasidu syari’ah,

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), h. 241.

¹³ Abul A’la al-Maududi, *Al-Dawa’un ‘ala Harakat al-Tadhamun al-Islam*, terjemahan Abdullah Suhaeli (Jakarta: Sinar Hudaya, 1972), h. 266.

¹⁴ Abdul Qadir al-Audah, *Al-Islam wa Audhauna al-Siyasah*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi 1997), h. 195.

¹⁵ Abdul Karim Zaidan, *Al-Fardlu wa Daulah fi Syariat al-Islamiyah* (Beirut: al-Itihad al-Islami al-Alami, 1970), h. 23.

maka hak rakyat pun tidak lepas dari *maqasidu syari'ah* dalam arti yang seluas-luasnya.

Apabila kita sebut hak *imam* adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan serta dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.

Maka dari itu sebagai rakyat, kita harus taat terhadap pemimpin. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 59 yaitu sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa: 59).

Berdasarkan latar belakang di atas ingin meneliti lebih jauh mengenai “Pandangan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”,

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan di teliti adalah pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menertibkan parkir liar sehingga tidak akan terjadi pembahasan yang terlalu lebar dan meluas.

E. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi topik pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menertibkan parkir liar?
2. Bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menertibkan parkir liar?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menertibkan parkir liar.
2. Untuk menganalisis pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menertibkan parkir liar.

G. Signifikansi Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran dan informasi khususnya bagi masyarakat Kota Bandar Lampung mengenai strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang digunakan dalam menertibkan parkir liar dan umumnya bagi masyarakat Provinsi Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat dengan masyarakat.¹⁶ Jadi penulis mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang ada di tengah masyarakat dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Adapun objek penelitian lapangan tersebut adalah studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁷ Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinprestasikan, dan kemudian di simpulkan.¹⁸

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yaitu dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung:Manadr Maju, 1996), h. 3

¹⁷ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998), h. 7.

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta; Grafik Grafika, 2011), h. 105.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.¹⁹ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 594 orang di Dinas Perhubungan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 325 orang, Pegawai Tenaga Kontrak 116, dan Tenaga Kerja Sukarela 153 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri sampel yang diambil

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung, Alfabeta, 2011), h. 80.

karena pertimbangan tertentu.²⁰ Oleh karenanya, peneliti harus benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian, kriteria yang pantas untuk dijadikan sampel pada penelitian ini adalah 10 orang yaitu:

- 1) Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 1 orang.
- 2) Seksi Pengawasan dan Penertiban Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 1 orang
- 3) Seksi Pendapatan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 2 orang.
- 4) UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 3 orang.
- 5) Juru Parkir 2 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²¹ Observasi dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden

²⁰ *Ibid.* h. 81.

²¹ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: 2015), h. 105.

dicatat atau direkam.²² Yaitu penulis melakukan wawancara terhadap pegawai dan staf jajaran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.²³ Dokumentasi yang digunakan peneliti *terkait* dengan pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumen bisa berupa data-data dari kepala staf kepegawaian atau staf yang lainnya dengan pokok masalah yang peneliti ambil.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu member catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur'an dan hadits, atau buku-buku literature lainnya yang relavan dengan penelitian.

²² *Ibid*, h. 97.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suratan Pendekatan* (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), h. 231.

c. Sistematika data yaitu merupakan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁴

6. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis data. Adapun metode yang digunakan dalam analisa adalah metode kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul sangat sedikit, bersifat monografis atau wujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktural klasifikasi), maka analisisnya bersifat kualitatif, selanjutnya analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan terakhir guna memberi jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan menertibkan parkir liar menurut pandangan *fiqh siyasah* dan perda setelah semua terkumpul, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berfikir induktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus dan kongrit, ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁵

²⁴ Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107

²⁵ *Ibid.* h. 32.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

a. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. *Fiqh* merupakan bentuk *mashdar* dari tashrifan kata *fiqha-yafaqhu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.¹

Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.² Kata *fiqh* secara arti kata berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “*fa qa ha*” yang terdapat dalam al-Quran. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin. Karena itulah al-Tirmizi menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.³

¹ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta, Bulan Bintang: 2003), h. 591.

² Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh* (Mishr, Dar al-Fikr al-Arabi: 1958), h. 6.

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bandung, Prenada Media: 2003), h. 5.

Lebih lanjut secara istilah, menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah).⁴ Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Menurut Muhammad Iqbal, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁵

Pendapat lain menyatakan bahwa *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah,

⁴ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta, Bulan: 2004), h. 26.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 3.

memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*. Secara harfiah kata *as siyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasa dan arti-arti lainnya.⁶

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf,⁷ mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Lebih lanjut pengertian *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukannya.⁸

Lebih lanjut, Suyuthi Pulungan,⁹ mengemukakan definisi *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.

⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 41.

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), h. 7.

⁸ *Ibid*, h. 8.

⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), h. 22-23.

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudharatan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyasah* dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan *fiqh siyasah*. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy,¹⁰ sebagai contoh membaginya kedalam delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).

¹⁰ Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.th.), h. 8.

- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- 5) *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- 6) *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dauliyah* (Politik Hubungan Internasional).
- 7) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Dari sekian uraian tentang, ruang klasifikasi *fiqh siyâsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. Pertama (1): politik-undangan (*Siyâsah Dustûriyyah*). Bagian ini membahas pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyrî'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadlâ'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idâriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.¹¹

Kedua (2): politik luar negeri (*Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah*). Bagian ini membahas hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada masalah politik peperangan (*Siyâsah Harbiyyah*), yang memuat etika berperang, dasar-dasar yang diizinkan berperang, pengumuman perang, perang melawan, dan genjatan senjata.¹²

Ketiga (3): politik keuangan dan moneter (*Siyâsah Mâliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos dan

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 13.

¹² *Ibid.* h. 14

belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan / hak-hak publik, pajak dan perbankan.¹³

Adapun Imam Ibn Taimiyyah,¹⁴ meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qhada'iyyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf,¹⁵ di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara. Dalam ruang lingkup dan kajian *fiqh siyasah*, terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan ruang lingkungannya, maka pembagian *fiqh siyasah* menurut Muhammad Iqbal,¹⁶ dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- 1) Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) meliputi tentang :
 - a) Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau Legislatif.
 - b) Peradilan (*qadha'iyyah*) atau yudikatif.
 - c) Administratif pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.
- 2) Politik luar negeri (*siyasah dauliyah*) meliputi tentang :
 - a) Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau hukum perdata internasional.

¹³ *Ibid.* h. 14.

¹⁴ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014). h. 269.

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, h. 23.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 15-16.

- b) Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
 - c) Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*)
- 3) Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*).

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersikap teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).¹⁷

Tentu saja, persoalan dapat diperluas seluas ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* itu sendiri. Sebagai contoh, bidang-bidang kehidupan apa saja yang harus dapat pengaturan? Bagaimana pengaturan hubungan antara warga negara dengan lembaga negara Islam dengan lembaga negara dengan lembaga negara lain, baik yang Islam maupun non-Islam? Dan seterusnya.

¹⁷ *Ibid.* h. 14.

Pembidangan-pembidangan diatas tidak selayaknya dipandang sebagai “pembidangan yang telah selesai”. Pembidangan *fiqh siyasah* telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*. Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan manusia yang menuntut pengaturan *siyasah*, dibedakan:

- 1) *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
- 2) *Fiqh siyasah dauliyyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
- 3) *Fiqh siyasah maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

2. *Siyasah Dusturiyah*

Dusturiyah berasal dari kata “*dusturi*” yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan

hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).¹⁸

Lebih lanjut yang dimaksud dengan *dusturi* yaitu, “*Dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.”¹⁹ Abul A’la al-Maududi menakrifkan *dusturi* dengan, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”²⁰

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata *dusturi* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari’at yang disebutkan di dalam al-Qur’an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.²¹

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, h. 54.

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, h. 52

²⁰ *Ibid*,

²¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur’an dan* (Bandung: Bulan Bintang, 2003, h. 46-47.

konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²²

Sementara menurut H. A. Djazuli, *fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizaroh* dan perbandingannya.²³

Sementara mengenai objek kajian *fiqh siyasah dusturiyah* H. A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 178

²³ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, h. 73-74.

pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsi-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁴

Dengan demikian, kajian pertama dari *fiqh siyasah* adalah kajian *fiqh siyasah dusturiyah*. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karena secara definitif, *tasyri'* adalah kata yang diambil dari lafadz *syari'ah* yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, *tasyri'* diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah Saw agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi pekerti. Dari syariah dalam pengertian itu, dipetik kata *tasyri'* yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. *Tasyri'* dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut

²⁴ *Ibid.* h. 73.

dengan *tasyri' samawiy* maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah *tasyri' wad'iyy*.²⁵

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.²⁶ Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah* akan tercapai.²⁷

Atas hal-hal di ataslah *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kully*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, *maqosid al-Syariah*; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.²⁸

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 36.

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 154.

²⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, h. 47.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 48.

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.²⁹

Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah Saw dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".³⁰

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.³¹

²⁹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan* (Bandung: Bulan Bintang, 2003), h. 11

³⁰ Abdul Qodir Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, h. 119.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 157.

Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca Khulafa' ar-Rasidun tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.³²

Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah "*Majlis Syura*" atau "*ahl al-halli wa al-aqdi*" atau seperti yang disebut Abu A'la al-Maududi sebagai "*Dewan Penasehat*" serta al-Mawardi menyebutnya dengan *ahl al-Ikhtiyar*.³³

Dari batasan-batasan diatas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam

³² Ibid. h. 158.

³³ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, h. 76.

berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.³⁴

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T. M. Hasby Ash Shiddieqy yaitu: “objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah *amah* yang tetap”.³⁵

Lebih lanjut, Suyuthi Pulungan,³⁶ mengemukakan objek kajian *fiqh siyasah* adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian *fiqh siyasah* tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah.

Dengan metode-metodenya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam. Di samping itu, metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam.

³⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah* ..., h. 45-46.

³⁵ T. M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Siyasah Sya'iyah* ..., h. 28.

³⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* ..., h. 29.

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
- b. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
- c. Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*)
- d. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
- e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i*).³⁷

Allah mensyari'atkan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, menurut para ulama *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang hamba akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya ia akan memperoleh kemafsadatan manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik.³⁸

³⁷ Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum". *AL-ADALAH* Vol. XII, No 1 (Juni 2014), h. 67.

³⁸ Akmaludin Sya'bani, "Maqashid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad", *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram*, Vol. 8 No. 1 (Juli 2015) h. 128.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penertiban parkir liar bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syariat* dan tidak ada '*illat* yang keluar dari *syara*' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara*', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan *kemadaratan* atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-mashlahhah al-mursalah*. Sehingga *mashlahhah al-mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Tujuan utama dari *mashlahhah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari *kemadaratan* dan menjaga kemanfaatannya.³⁹

Kata "*mashlahhah*" berakar pada *al-ashlu*, ia merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *shalahha* dan *shaluhha* yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *sharaf* (morfologi), kata "*mashlahhah*" satu pola dan semakna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*mashlah* dan *manfa'ah*) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi "maslahat" dan "manfaat".⁴⁰

Secara etimologis, kata *mashlahhah* adalah kata benda infinitif dari akar kata *shaluhha*. Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur atau secara

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 117.

⁴⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 127.

alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.⁴¹

Secara terminologis, *al-mashlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *maslahat* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, kemanfaatan, kepentingan. Sementara kata “manfaat” diartikan dengan guna, faedah. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebaikan atau lawan kata dari “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.⁴² Dalam arti yang umum, *masalahah* adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menertibkan lalu lintas yang dalam hal ini mengenai penertiban parkir liar, maka merujuk pada sebuah *kaidah fiqh* yaitu, menurut *kaidah fiqh* yang berbunyi *الضَّرَرُ يُزَالُ* *Adh-Dhararu Yuzaalu* (Kemudharatan Dihilangkan Sebisa Mungkin). Kaidah ini berkaitan dengan kemudharatan yang terjadi di antara para

⁴¹ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 93.

⁴² *Ibid.* h. 93.

hamba, dimana kemudharatan, kesulitan, dan sejenisnya sebisa mungkin dihilangkan di antara para hamba.⁴³

Jadi berdasarkan kaidah tersebut bahwa penertiban parkir liar yang dilakukan oleh pemerintah itu diperbolehkan karena parkir liar bisa mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Tidak boleh bagi seorang muslim maupun non muslim untuk melanggar peraturan negara terkait rambu lalu lintas. Karena tindakannya ini menyebabkan bahaya besar baginya dan orang lain. Pihak pemerintah membuat undang-undang dan peraturan tersebut, dalam rangka menjaga kemaslahatan seluruh masyarakat, dan menghindarkan bahaya agar tidak menimpa kaum muslimin. Karena itu, tidak boleh bagi seorangpun untuk melanggar aturan itu. Dan pemerintah boleh memberikan hukuman untuk perbuatan itu, yang bisa membuatnya jera. Karena Allah menghentikan maksiat masyarakat melalui penguasa, yang tidak bisa dihentikan dengan al-Quran dan sunah. Mereka bisa berhenti dari pelanggaran, karena hukuman yang diberikan oleh pemerintah.⁴⁴

3. *Siyasah Tanfiziyyah*

⁴³ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 35.

⁴⁴ Konsultasi Agama dan Tanya Jawab Pendidikan Islam, "Hukum Melanggar Lalu Lintas" (On-Line), tersedia di: <https://konsultasisyariah.com/22419-hukum-melanggar-lalu-lintas.html> (15 Oktober 2019).

Kekuasaan eksekutif atau *Siyasah Tanfiziyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *Imarah/'amir*, dan *wizarah/wazir*.

a. *Imamah/Imam*

Kata *imamah* dalam wacana *fiqh siyasah*, biasanya diidentikan dengan kata *khalifah*. Keduanya menunjukkan kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah *khilafah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami *imamah*. Kelompok Syi'ah memandang bahwa *imamah* merupakan bagian dari prinsip ajaran agama. Sedangkan Sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir Sunni menggunakan terminologi *imamah* untuk pembahasan tentang *khilafah*.⁴⁵

Al-Mawardi menyebut dua hak *imam*, yaitu hak ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi *imam*, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta *baitul mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*. Hak yang ketiga ini pada masa Abu Bakar, diceritakan bahwa 6 bulan setelah diangkat jadi khalifah, Abu Bakar masih pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah keluarganya. Kemudian para sahabat

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 149.

bermusyawarah, karena tidak mungkin seorang *khalifah* dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Maka akhirnya diberi gaji 6.000 dirham setahun, dan menurut riwayat lain digaji 2.000 sampai 2.500 dirham.⁴⁶

Mengenai kewajiban-kewajiban *imam*, ternyata tidak ada kesepakatan di antara ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan kewajiban *imam* menurut Al-Mawardi sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
- 2) Menta'fidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- 3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan dengan jiwanya atau hartanya.
- 4) Menegakkan hukum-hukum Allah Swt agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.

⁴⁶ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, h. 17.

⁴⁷ *Ibid.* h. 15-16.

- 5) Menjaga tapal batas dan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu'ahid*).
- 6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi *kafir dzimi*.
- 7) Memungut *fay* dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau *ijtihad* tanpa ragu-ragu.
- 8) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari *baitul mal* dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- 9) Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
- 10) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.

b. Khilafah/Khalifah

Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, *khilafah* merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Saw. Dalam

bahasa Ibn Khaldun, kekhalifahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul da'wah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan *khilafah* adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. Melalaikan berdirinya kekhalifahan merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih.⁴⁸

Mengenai hukum memilih pemimpin, dalam hal ini dikalangan ulama terjadi variasi pendapat. Menurut semua ulama Sunni, Syiah dan Murjiah, mayoritas pengikut Mu'tazilah dan Khawarij, kecuali sekte Najdat, mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila meninggalkannya.⁴⁹

Sedangkan menurut golongan najdat salah satu sakte Khawarij, utamanya Fathiyah Ibn Amir al-Hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya, terserah pada kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa apabila meninggalkannya, dan tidak pula mendapat pahala bila melakukannya. Sebab tidak ada satu pun argumentasi *naqliyah* dan *aqliyah* yang memerintahkan atau melarangnya.⁵⁰

⁴⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, h. 204-205.

⁴⁹ *Ibid.* h. 108.

⁵⁰ *Ibid.*

Pandangan senada antara lain didukung pula oleh sebagian kecil pengikut Mu'tazilah, utamanya Abu Bakar al-Asham, Hisyam Ibn Amral-Futidan Ubad Ibn Sulaiman, salah seorang murid Hisyam Ibn Amr al-Futi. Bahkan lebih jauh dari itu al-Asham, sebagaimana disinggung sebelumnya, berpendapat bahwa mengangkat pemimpin itu tidak perlu sama sekali bila umat manusia telah tunduk dan patuh pada peraturan dan setia pada kebenaran. Tapi bila sebaliknya, yakni melanggar peraturan dan menyimpang dari garis kebenaran yang berdampak pada timbulnya anarki, maka barulah boleh diangkat seorang pemimpin untuk meluruskannya.⁵¹

Al-Qurtubhi yang merupakan ulama Sunni menanggapi pernyataan al-Asham dan mengatakan bahwa al-Asham adalah orang yang tidak mengerti syariat, begitu juga orang-orang yang berkata seperti perkataannya dan mengikuti pendapat juga madzhabnya. Menurut al-Qurthubi mengangkat pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan hukum-hukumnya dapat terlaksana.⁵²

c. *Imarah/'amir*

Istilah *imarah* merupakan *masdar* dari *amira* yang berarti *ke-amiraan* atau pemerintahan. Kata *amir* bermakna pemimpin. Istilah *amir* di masa Rasullulah Saw dan *Khulafaurrasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer

⁵¹ *Ibid.* h. 108-109.

⁵² Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terjemahan Fathur Rahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 588.

(*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, dan *Amir al-Umar*. Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Atas dasar makna-makna tersebut, *amir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.⁵³

Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *Saqifah Bani Sa'idah*. Gelar *Amirul Mukminin* disematkan pertama kali kepada khalifah Umar bin al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *amir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*Khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat.⁵⁴

d. Wizarah/Wazir

Kata *wizarah* berasal dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama suatu kementrian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan public demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.⁵⁵

⁵³ La Samsu, “*Al-Sultah al-Tasyri'iyah, al-Sultah al-Tanfidziyyah, al-Sultah al-Qadha'iyah*”. *Tahkim*, Vol. XII No. 1 (Juni 2017). h. 167.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam....*, h. 166

Ada dua macam *wazir*, yaitu *wazir tafwidl* dan *wazir tanfidz*. para sarjana-sarjan muslim menyamakan *wazir tafwidl* dengan perdana menteri atau wakil presiden dan menyamakan *wazir tanfidz* dengan menteri-menteri lainnya. Sudah tentu hal tersebut tidaklah persis demikian, sebab sudah tentu konstelasi politik zaman dulu sangat jauh berbeda dengan sekarang, satu hal barangkali yang dapat ditarik dari konsep tentang *wazir* ini adalah kepala negara dapat mengangkat pembantu-pembantunya dan menyerahkan sebagian kekuasaan yang ada padanya kepada para pembantunya dengan tujuan agar tugas-tugas *imam* yang cukup berat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama.⁵⁶

4. Parkir Menurut Peraturan Perundang-undangan

Fasilitas parkir terdiri atas Fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan dan Fasilitas Parkir di ruang milik jalan. Fasilitas parkir, dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan usaha. Pengelolaan parkir oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas. Pengelolaan fasilitas parkir oleh badan usaha dikelola sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau fasilitas parkir untuk menunjang usaha pokok yang penyelenggaraanya dibawah koordinasi Dinas. Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat berupa :

- a. Gedung parkir murni
- b. Gedung parkir pendukung

⁵⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* ..., h. 80.

c. Pelataran/ taman parkir murni dan/atau

d. Pelataran/ taman parkir pendukung.⁵⁷

Setiap bangunan umum dan/ atau yang diperuntukkan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan Satuan Ruang Parkir (SRP). Apabila penyediaan fasilitas parkir, tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama sama dengan bangunan lain yang berdekatan. Penyediaan fasilitas parkir secara kolektif atau bersama sama, dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dalam pelaksanaannya di bawah koordinasi Dinas. Penyediaan fasilitas parkir, harus memenuhi persyaratan yaitu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas, Keamanan dan Keselamatan Pengguna Parkir, Kelestarian Lingkungan, Kemudahan bagi pengguna jasa parker, Aksesibilitas penyandang disabilitas, dan Memenuhi SRP minimal. Persyaratannya yaitu tidak mengurangi Ruang Terbuka Hijau (RTH).⁵⁸

Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor. Fasilitas parkir sepeda harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman. Penetapan lokasi fasilitas parkir harus memperhatikan rencana umum tata ruang, analisis dampak lalu lintas, kemudahan bagi pengguna

⁵⁷ Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung, Pasal 21-23

⁵⁸ Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung, Pasal 24-25

jasa; dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Lokasi fasilitas parkir ditetapkan oleh:

- a. Gubernur untuk lokasi parkir yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Bupati untuk lokasi parkir yang berada di wilayah administrasi kabupaten; dan
- c. Walikota untuk lokasi parkir yang berada di wilayah administrasi kota.⁵⁹

Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin. Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik Jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa usaha khusus perpajakan atau penunjang usaha pokok. Izin penyelenggaraan fasilitas parkir diberikan oleh:

- a. Gubernur untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Bupati untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi kabupaten; dan
- c. Walikota untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi kota.⁶⁰

Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 100

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 101

- a. Menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
- b. Melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
- c. Memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- d. Menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
- e. Memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
- f. Mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶¹

Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir. Standar teknis meliputi:

- a. kebutuhan ruang parkir;
- b. persyaratan satuan ruang parkir;
- c. komposisi peruntukkan;
- d. kemiringan;
- e. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
- f. alat penerangan;
- g. sirkulasi kendaraan;
- h. fasilitas pemadam kebakaran;

⁶¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 102 Ayat 1

- i. fasilitas pengaman; dan
- j. fasilitas keselamatan.⁶²

Selain memenuhi standar teknis, fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:

- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. *ramp up* dan *ramp down*;
- c. sirkulasi udara;
- d. radius putar; dan
- e. jalur keluar darurat.⁶³

Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis.

Rekomendasi diberikan oleh:

- a. Menteri untuk gedung parkir yang berada di jalan nasional;
- b. Gubernur untuk gedung parkir yang berada di jalan provinsi; dan
- c. Bupati/walikota untuk gedung parkir yang berada di jalan kabupaten/kota.⁶⁴

Setiap penyelenggara parkir umum diluar ruang milik jalan wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir. Asuransi, menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi

⁶² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 102 Ayat 2 dan 3

⁶³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 102 Ayat 4

⁶⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 102 Ayat 5 dan 6.

kendaraan. Setiap penyelenggara parkir wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perparkiran. Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM parkir, diatur dengan Peraturan Walikota. Penyelenggara parkir bertanggungjawab atas:

- a. Kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. Memenuhi kewajiban atas pajak parkir;
- c. Menyediakan informasi parkir, biaya parkir, rambu parkir, dan sarana parkir;
- d. Menyediakan pakaian seragam bagi Petugas Parkir;
- e. Menjaga keamanan dan ketertiban di fasilitas parkir; dan
- f. Menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan fasilitas parkir.⁶⁵

Setiap pengguna jasa parkir mempunyai hak Mendapatkan satuan ruang parker, Memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian satuan ruang parker, Mendapatkan rasa aman atas pemakaian satuan ruang parker dan Mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar. Pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban Membayar atas pemakaian SRP, Menyimpan karcis parkir atau sejenisnya atas pemakaian SRP, Mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir, dan ketentuan parkir lainnya, Memastikan kendaraan terkunci dengan baik dan Tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir atau sejenisnya di dalam mobil.⁶⁶

⁶⁵ Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung, Pasal 36, 37, dan 38.

⁶⁶ Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung, Pasal 39 dan 40.

Tarif layanan parkir ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir dan Retribusi Parkir. Perubahan atas tarif layanan parkir ditetapkan oleh walikota berdasarkan Kawasan (zona) parkir, Jenis kendaraan dan Jam penggunaan SRP. Penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan (*off street*) merupakan objek pajak parkir. Dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka pemungutan pajak parkir dilaksanakan melalui transaksi secara online.⁶⁷

Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan. Formula perhitungan tarif dihitung berdasarkan penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari, perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu, biaya operasional, dan asuransi. Formula perhitungan tarif ditetapkan oleh Menteri. Besaran tarif dihitung berdasarkan formula dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk lokasi parkir di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan peraturan daerah kabupaten/kota untuk lokasi parkir di wilayah kabupaten/kota.⁶⁸

Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kolektor dan jalan lokal berdasarkan kawasan (*zona*) pengendalian parkir. Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas

⁶⁷ Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung, Pasal 41 dan 42.

⁶⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 103

parkir, ditetapkan oleh Walikota. Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir wajib memperhatikan :

- a. Lebar jalan;
- b. Volume lalu lintas;
- c. Karakteristik kecepatan;
- d. Dimensi kendaraan;
- e. Peruntukan lahan sekitarnya; dan
- f. Peranan jalan bersangkutan.⁶⁹

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang

⁶⁹ Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung, Pasal 26-27 Ayat 1

berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.⁷⁰

Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor. Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan terdiri atas:

- a. Jalan kelas I yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

⁷⁰ Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 8

d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton. Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.⁷¹

Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan oleh:

- a. Pemerintah, untuk jalan nasional;
- b. pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi;
- c. pemerintah kabupaten, untuk jalan kabupaten; atau
- d. pemerintah kota, untuk jalan kota.⁷²

Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dapat diberlakukan dalam bentuk lingkungan parkir. Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir, dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan hari dan/ atau waktu dengan rambu lalu lintas. Fasilitas parkir di ruang milik jalan ditentukan berdasarkan kawasan (*zona*), dengan memperhatikan :

- a. Frekuensi Parkir;
- b. Jenis Kawasan; dan
- c. Derajat Kemacetan Lalu Lintas.⁷³

⁷¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pasal 19

⁷² Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pasal 20

⁷³ Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung, Pasal 27 Ayat 2 dan 3 dan Pasal 28

Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir wajib dievaluasi setiap 2 (dua) tahun. Walikota dapat meniadakan penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir apabila, Mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Di ruas jalan tersebut tersedia gedung parkir dan/atau taman parkir sesuai jangkauan dan kapasitas satuan ruang parkir yang tersedia; dan/atau Di ruas jalan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Peniadaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir harus dilakukan secara bertahap. Setiap orang yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dinas. Penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu, harus menempatkan petugas parkir. Petugas parkir dalam pelaksanaan tugasnya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Dinas.⁷⁴

Setiap kegiatan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dinas. Izin terdiri dari Izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir dan Izin penyelenggaraan parkir dengan tidak memungut biaya parkir. Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir, penanggung jawab kegiatan usaha harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis. Izin penyelenggaraan parkir berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Izin

⁷⁴ Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung, Pasal 29, 30 dan 31.

penyelenggaraan parkir, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Dinas.⁷⁵

Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau menempatkan petugas parkir. Dalam mengawasi, menjamin keamanan, dan menertibkan lalu lintas penyelenggara parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. Penyelenggara parkir wajib menyediakan karcis atau sticker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir. Pengenaan biaya parkir, sesuai dengan lama penggunaan satuan ruang parkir.⁷⁶

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang parkir. Pembatasan kapasitas ruang parkir dapat dilakukan dengan pemberlakuan tarif parkir khusus. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan

⁷⁵ Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung, Pasal 32 dan 33.

⁷⁶ Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung, Pasal 34 dan 35

diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan:

- a. Paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten/kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
- b. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- d. Kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- e. Tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.⁷⁷

Parkir di dalam ruang milik jalan dilarang dilakukan di:

- a. Tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus Pejalan Kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

⁷⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 104 dan 105.

- k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.⁷⁸

Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan ditetapkan oleh: gubernur untuk jalan kota yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa dan walikota untuk jalan kota. Penetapan lokasi parkir dilaksanakan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat dipungut tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib:

- a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
- b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
- c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
- e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁹

⁷⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106

⁷⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 107 dan 108 Ayat 1 dan 2

Pengguna parkir di dalam ruang milik jalan wajib mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas dan mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir. Penyelenggara parkir dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁰

Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk penyandang cacat, manusia usia lanjut dan wanita hamil. Tempat parkir khusus paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
- b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
- c. dipasang tanda parkir khusus; dan
- d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.⁸¹

Pembayaran retribusi berupa karcis dilakukan secara langsung kepada petugas parkir. Pembayaran retribusi langganan paker dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD. Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam. Dalam penyelenggaraan pengelolaan

⁸⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 108 Ayat 3 dan 4

⁸¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 109

parker, Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga.⁸²

Petugas parker di ruang milik jalan terdiri atas juru parker dan coordinator pengelola wilayah parkir. Petugas parker wajib membawa surat perintah tugas (SPT) yang masih berlaku, tanda pengenalan diri dan perlengkapan lainnya. SPT diberikan sebagai penunjuk tugas juru parker pada lokasi tertentu. Juru parkir mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran penggunaan satuan ruang parkir sesuai ketentuan
- d. Menyetorkan hasil pungutan parkir kepada kordinator pengelola wilayah parkir pada hari itu
- e. Menjaga kelancaran lalu lintas di tempat parkir.⁸³

Juru parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain. Koordinator pengelola wilayah parkir mempunyai tugas:

- a. Mengatur teknis oprasional juru parkir

⁸² Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bandar Lampung, Pasal 20

⁸³ Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bandar Lampung, Pasal 21 dan Pasal 22 Ayat 1-4.

- b. Menerima hasil pungutan parkir dari juru parkir dan distorkan kepada bendahara pembantu penerima dinas dengan menggunakan SSRD dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.
- c. Mengawasi dan menertibkan wilayah parkir secara berkala serta melaksanakan pembinaan kepada juru parkir.⁸⁴

Pembinaan terhadap petugas parkir dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan dan penugasan juru parkir didasarkan atas perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis antara coordinator pengelola wilayah parkir dengan juru parkir.
- b. Perjanjian kerja berpedoman kepada hasil pendataan dan potensi parkir yang ditetapkan.
- c. Pengangkatan dan penugasan juru parkir berlaku setiap 6 (enam) bulan tahun berjalan disesuaikan dengan data potensi
- d. Petugas parkir yang tidak mematuhi peraturan dan ketentuan, dapat diberhentikan atau dicabut surat perintah tugasnya dengan terlebih dahulu diberikan peringatan.⁸⁵

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang memuat uraian secara sistematis tentang hasil penulisan terdahulu (*preliminary reasearch*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi.

⁸⁴ Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bandar Lampung, Pasal 22 Ayat 5 dan 6.

⁸⁵ Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bandar Lampung, Pasal 22 Ayat 7.

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain:

1. Riski Atika Sari dari Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, tahun 2015 dengan judul skripsi *“Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kota Metro”*. Di dalam skripsi tersebut, dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran Kota Metro tidak memiliki strategi khusus dalam penanggulangan parkir liar. UPT Perparkiran Kota Metro hanya melakukan tindakan preventif yang sifatnya hanya sementara karena tidak menanggulangi parkir liar secara tuntas. Rekomendasi strategi yang digunakan dalam menanggulangi parkir liar adalah meresmikan petugas parkir liar dengan memberikan lokasi parkir baru yang letaknya strategis.⁸⁶
2. Nita Haryanti, dari Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, tahun 2010, dengan judul skripsi *“Strategi Pengelolaan Perparkiran di Kota Salatiga”*. Di dalam skripsi tersebut, dijelaskan bahwa kondisi penataan parkir di Kota Salatiga belum tertata rapi dan juga belum optimalnya pengelolaan parkir, seperti banyaknya badan jalan yang berkurang untuk parkir, minimnya kebutuhan

⁸⁶ Riski Atika Sari, *“Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kota Metro”*. (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Lampung, 2015), h. 83.

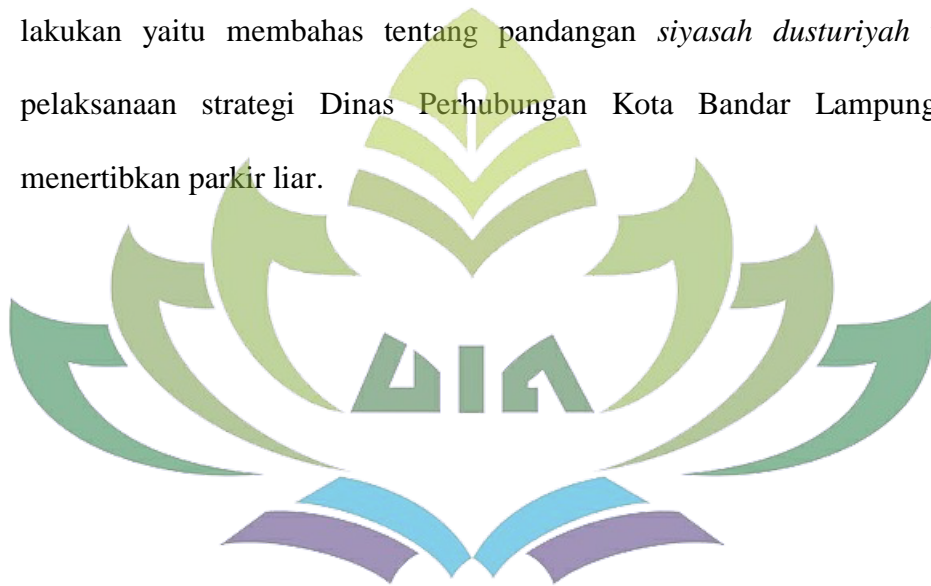
ruang parkir sehingga dapat berujung pada kemacetan di sejumlah ruas jalan pada jam tertentu dan masih adanya tariff retribusi yang tidak sesuai ketentuan. Belum maksimalnya manajemen perparkiran yang dimiliki oleh UPT Perparkiran, baik dari segi jumlah pegawai yang kurang untuk patroli pengawasan di lapangan, belum optimalnya koordinasi yang dijalankan untuk penanganan masalah parkir di lapangan, serta belum terealisasinya pencapaian target retribusi.⁸⁷

3. Dessy Wulandari, dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, tahun 2013, dengan judul skripsi *“Strategi Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang”*. Di dalam skripsi tersebut, dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan, pernah melakukan tindakan seperti langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan apakah ada hal-hal yang melanggar, seperti praktek parkir liar. Mengempeskan ban-ban kendaraan bermotor yang parkir sembarangan. Ini dilakukan agar oknum-oknum dan masyarakat yang melanggar tersebut mendapat efek jera meskipun dampak maupun hasilnya belum maksimal. Kemudian pemerintah juga berupaya memberikan sosialisasi, baik dari media cetak, media elektronik, dan media informasi lainnya.⁸⁸

⁸⁷ Nita Haryanti, “Strategi Pengelolaan Perparkiran DI Kota Salatiga”. (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), h. 97.

⁸⁸ Dessy Wulandari, “Strategi Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2013), h. 84

Maka dengan demikian dari tiga skripsi di atas belum ada yang membahas tentang perparkiran seperti yang penulis teliti ini, dimana Riski Atika Sari membahas tentang strategi Dinas Perhubungan dalam menanggulangi parkir liar di tepi jalan umum Kota Metro, Nita Haryanti membahas tentang strategi pengelolaan perparkiran di Kota Salatiga dan Dessy Wulandari membahas tentang strategi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Malang, adapun yang penulis lakukan yaitu membahas tentang pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menertibkan parkir liar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir al-Audah, *Al-Islam wa Audhanu al-Siyasah* Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1997.
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Fardhu wa Daulah fi Syariat al-Islamiyah* al-Itihad al-Islami al-Alami, 1970.
- Abdul Qodir Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* Jakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Abul A'la al-Maududi, *Al-Dawa'un 'ala Harakat al-Tadhamun al-Islam*, terjemahan, Abdullah Suhaeli Jakarta: Sinar Huda, 2002.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan* Bandung: Bulan Bintang, 2003.
- Akmaludin Sya'bani, "Maqashid al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad". *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram*, Vol. 8, No. 1 (Juli 2015).
- Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid III*, terjemahan, Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007.
- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* Bandung: Prenada Media: 2003.
- Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* Jakarta: Bulan Bintang: 2003.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* Jakarta: Amzah, 2011.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Cholid Narbuto, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Didin Hadifuddin dan Henri Tanjung, *Management Syariah Dalam Praktik* Jakarta: Gema Insani Press, 2012.

Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* Yogyakarta: Madah, t.th.

H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syari'ah* Jakarta: Prenada Media, 2005.

Juliansyah, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2010.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Bandung: Mandar Maju, 2006.

Konsultasi Agama dan Tanya Jawab Pendidikan Islam, "Hukum Melanggar Lalu Lintas" (On-Line), tersedia di: <https://konsultasisyariah.com/22419-hukum-melanggar-lalu-lintas.html> (15 Oktober 2019).

Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum". *AL-ADALAH* Vol. XII, No 1 (Juni 2014).

Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah* YogYakarta: Teras, 2011.

Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, Mishr Dar al-Fikr al-Arabi: 1998.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 79 Tahun 2013 Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Walikota Bandar Lampung No 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bandar Lampung.

Perda Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Sarifudin Azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Sunarto, *MSDM Strategik* Yogyakarta: Amus, 2004.

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* Bandar Lampung: 2015.

Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* Jakarta: Bulan: 2002.

Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Undang-undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an* Bandung: Bulan Bintang, 2003.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

